

TAJUK RENCANA

Penipuan Online Merajalela, Perlu Pelindung

KEJAHATAN memang selalu mengintai kita. Modus yang digunakan juga beraneka macam. Dengan kian bergantungnya masyarakat dari gadget, penipu pun memanfaatkannya untuk melancarkan aksinya. Tidak sedikit warga yang sudah menjadi korban, misalnya uang tabungannya di rekening bank habis terkuras, atau nama dan fotonya digunakan untuk menipu orang lain yang merupakan relasi dan kenalannya.

Sebenarnya, sesama kenalan biasa saling mengabari kalau ada info modus-modus penipuan, misalnya kalau ada kiriman file apk (biasanya undangan maintenance dengan foto DP orang yang sudah dikenal) agar tidak diklik. Karena kalau file tersebut dibuka, maka otomatis HP sudah diretas oleh pengirim sehingga mobile banking yang ada di HP tersebut bisa digunakan oleh pengirim file. Termasuk nomor HP yang tersebut android tersebut juga bisa dihubungi oleh penipu, misalnya untuk meminjam uang. Karena dengan nomor dan identitas yang dikenal, maka yang menerima permintaan pinjaman uang tersebut mudah percaya, padahal dari penipu yang sudah berhasil meretas HP temannya. Sering juga pengirim menggunakan foto DP logo bank tertentu dan memberi informasi terkait tabungan, misalnya transfer dengan biaya 0% atau aka ada perubahan biaya transfer. Padahal tujuannya untuk menipu.

Di KR Kamis (27/7) kemarin juga diberitakan adanya modus penipuan mengatasnamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Modusnya menginformasikan kartu kepesertaan JKN akan diberhentikan, peserta diminta menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mengatasnamakan badan usaha, menyampaikan informasi palsu bahwa kartu kepesertaan peserta telah melebihi batas pemakaian terhadap obat-obatan. Selain itu juga info BPJS Kesehatan akan memberi bantuan sosial kepada peserta, modus rekrutmen kepegawaian hingga ancaman yang menyatakan bahwa kepesertaan JKN akan segera diblokir. Setelah penerima info tertarik, ujung-ujungnya hanya akan ditipu. Karena itu

Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Agustian Fardianto minta kepada seluruh masyarakat berhati-hati dan tidak mudah percaya.

Menghadapi kenyataan tersebut, kita jadi bertanya-tanya, kenapa data-data kita bisa bocor ke penipu? Lantas siapa yang membocorkan? Dengan menggunakan nomor HP yang dipakai, bisakah para penipu tersebut dilacak oleh yang berwajib dan tentu saja juga diringkus, termasuk hacker yang meretas HP kemudian menggunakannya untuk menguras uang melalui mobile banking. Dan masih banyak lagi pertanyaan terkait kenapa semua itu bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya.

Lantas, siapa yang mestinya melindungi masyarakat dari semua jenis kejahatan modern ini? Maka ePRI bagi aparat terkait untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, Kominfo yang bisa mengendalikannya komunikasi via IT dan penegak hukum untuk bisa memberi perlindungan kepada masyarakat. Jangan sampai penipu yang terus berkeliaran ini leluasa menjalankan aksinya. Masyarakat yang menjadi korban juga terus bertambah. Lembaga-lembaga terkait yang sering dicatut untuk modus, misalnya perbankan, mestinya juga tidak tinggal diam.

Lembaga-lembaga keuangan ini juga harus bisa melindungi nasabahnya. Jangan sampai uang yang dititipkannya diambil oleh orang yang tidak berhak, menggunakan aplikasi yang tidak resmi. Soal caranya bagaimana, tim IT lembaga tersebut mestinya bisa melakukannya. Termasuk para pimpinan provider jaringan seluler mestinya juga bisa melindungi para pemakai jasa selulernya dari berbagai kejahatan. Seandainya sudah terjadi, mestinya juga bisa ikut melacak pelakunya. Sehingga para pelanggannya merasa nyaman berkomunikasi.

Semoga masyarakat segera bisa menggunakan perkembangan IT saat ini dengan tenang dan aman karena adanya perlindungan dari mereka yang terkait. Meski begitu, kewaspadaan tetap harus ada dan jangan sampai terlena. □-d

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak beres ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Tanpa Komunikasi, Sampah Menumpuk

BAGAIMANA masalah sampah? Pertanyaan itu tiba-tiba dilontarkan seorang kawan, sedikit usia bertemu. Saat ini di DIY, bicara masalah sampah menghabiskan energi. Apalagi setelah TPS sementara di Cangkringan, ditolak warga. Meski TPS tersebut berada di tanah SG.

Ketika saya mengungkap Alhamdulillah, RT kami sejak awal sudah banyak membuat soal menata sampah. Bahwa di lapangan yang merupakan *public space* ada *jugangan*. Sementara tukang sampah hanya mengambil sampah sisa dapur. Sehingga sampah kertas, plastic dan lainnya dikelola sendiri.

Dia termenung. Lantas berkata, di tempat saya sampai sekarang belum ada komunikasi apapun meski TPA Piyungan sudah ditutup. Kami memang mendapat informasi bahwa TPA Piyungan ditutup. Namun setelah itu tidak ada informasi apapun, apalagi sosialisasi dan diskusi untuk mencari solusi.

Jadi sekarang di kawasan kami yang padat, lahan rumah rata-rata sudah habis untuk bangunan, tidak ada komunikasi antara RT/RW ataupun Kalurahan mengenai solusi persampahan. Sehingga di masing-masing rumah, sekarang menumpuk sampah. □-d

**) Hadi, Wonocatur
Banguntapan Bantul*

Pilpres 2024 dan Berpolitik Damai

Syahrul Kirom

PANCASILA sebagai dasar negara Indonesia sudah semestinya dijadikan petunjuk Calon Presiden 2024. Pancasila mengajarkan pada manusia Indonesia untuk selalu hidup dalam pengabdian untuk cita-cita nasional Bangsa Indonesia.

Pancasila disebut juga *weltanschauung* atau pandangan hidup yang mengarahkan tindakan manusia ke arah nilai-nilai kejujuran dan kebaikan. Hal itu menunjukkan bahwa Pancasila merupakan gagasan vital bangsa, sistem nilai dasar, yang derivasinya terbangun ke dalam sistem moral dan sistem hukum negara bangsa, negara kesatuan negara Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung sistem normatif bagi kehidupan berpolitik.

Landasan Berpolitik

Dalam nilai-nilai Pancasila, NKRI dan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika banyak memberikan perhatian penuh pada aktivitas politik. Bagaimana para wakil rakyat itu berperilaku dalam berpolitik yang lebih etis dengan menekankan pada nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan landasan dalam berpolitik. Ini merupakan bagian dari Pendidikan Pancasila.

Perpolitikan di Indonesia harus mencerminkan kehidupan kenegaraan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik dan partisipasi politik. Nilai-nilai Pancasila sudah semestinya harus dijadikan petunjuk dalam seluruh unsur berpolitik.

Nilai-nilai Pancasila haruslah dipahami terutama oleh calon presiden (capres). Karena merekalah yang ketika terpilih, kelak akan mengambil keputusan dan kebijakan serta melaksanakan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Karena itu, Pancasila harus

dipergunakan capres untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.

Politik adalah sikap dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Bukan politik



dalam bentuk kebijakan dan menerima sogokan untuk menggagalkan pembuatan undang-undang yang menguntungkan elite politik tertentu. Maka, masyarakat Indonesia harus semakin kritis dalam menentukan pilihan politiknya, apakah capres dan tim suksesnya itu cara main politiknya kotor atau bersih? Menjadi penting melihat *track record*-nya.

Penilaian

Pancasila itu mempunyai peran dan fungsi dalam diri manusia. Dengan tujuan untuk memberikan penilaian tentang baik dan buruknya, melainkan juga apa yang sudah seharusnya diputuskan dan kewajiban apa yang harus diutamakan dalam berpolitik secara etis.

Nilai-nilai Pancasila sangatlah berperan penting dalam memberikan petunjuk pada calon pemimpin untuk berpikir dalam mengambil tindakan serta keputusan politik yang baik dan buruk. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila adalah sumber kewajiban yang menuntut calon pemimpin bangsa ke jalan kebenaran dan kebaikan. Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artinya, nilai Pancasila yang digali Bung Karno, harus diamalkan dan diimplementasikan setelah capres terpilih menjadi presiden. Tentu dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam pemerintahan. □-d

**) Syahrul Kirom MPhil, Dosen
IAIN Syekh Nurjati Cirebon*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Tarik Ulur Kebijakan Bebas Visa Jokowi

Y Ivan Adi Kristianto

PRESIDEN Jokowi belum lama ini memutuskan untuk mencabut bebas kunjungan 159 negara. Kebijakan ini menurut Kemendikbud agar Indonesia hanya menerima wisatawan berkualitas (bersedia berwisata lama dan terus menerus). Dilihat dari alasan Kemendikbud, pencabutan bebas visa justru berlawanan dengan logika mendatangkan turis. Jika dipikir, untuk memperbesar peluang memperoleh wisatawan berkualitas, bukankah kebijakan bebas visa tidak perlu dihapus?

Kebijakan bebas visa sebelumnya diatur Peraturan Presiden No 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peningkatan jumlah wisatawan adalah alasan utama mengapa Jokowi menerbitkan kebijakan tersebut. Berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) masing-masing pada 2017 dan 2019 adalah 14.039.799 dan 16.106.954 wisatawan.

Kenaikkan jumlah wisatawan ini mengindikasikan adanya peningkatan ketertarikan warga asing untuk berwisata di Indonesia. Memang, pada 2020 hingga 2022 jumlah wisman maksimal per tahun hanya 5.889.031 orang. Namun perlu digarisbawahi, masa ini adalah periode pandemi Covid-19 dimana pembatasan mobilitas manusia relatif ketat.

Cara Instan

Langkah Jokowi ini merupakan cara instan untuk mencegah wisman yang melanggar ketentuan, seperti kelebihan tinggal, bekerja, serta pelanggaran terhadap norma dan adat setempat. Langkah ini bisa dibalang cara instan karena pemerintah belum menyentuh pokok permasalahan dari pelanggaran yang dilakukan wisman.

Ada dua pokok alasan yang seharusnya jadi titik permasalahan. *Pertama*, lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum.

Pemerintah bisa saja bekerja sama dengan masyarakat untuk melaporkan wisman yang tinggal melebihi batas maupun bekerja. Selain itu, pemerintah perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi pada mereka yang melanggar, seperti deportasi dan memasukkan dalam daftar hitam. Dengan kesadaran untuk mengawasi dan menegakkan aturan, wisman lebih sadar untuk patuh hukum.

Kedua, cara berpikir bahwa wisman adalah bangsa maju yang perlu mendapatkan keistimewaan dan masyarakat Indonesia merupakan warga kelas dua. Perilaku ini tercermin dari diskriminasi terhadap turis lokal. Sementara itu, wisman cenderung mendapat tempat istimewa bagi pelaku pariwisata. Cara berpikir ini di mata wisman bisa diartikan bahwa Indonesia sangat butuh wisman. Konsekuensinya, hubungan tidak setara ini mendorong wisma untuk mere-mehkan.

Paspor Indonesia

Tentunya, kebijakan membatasi wisman tidak dapat berdiri sendiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan Indonesia agar mendapatkan kepercayaan diri untuk memperkuat paspor Indonesia. Menurut indeks Henley, saat ini paspor Indonesia berada pada peringkat 76 bersama Tanzania. Negara tetangga seperti Timor Leste dan Thailand justru di atas Indonesia dengan masing-masing peringkat 59 dan 68.

Untuk memperkuat paspornya, dua hal setidaknya yang diperhatikan oleh Indonesia yakni kekuatan ekonomi dan keamanan.

Memang, produk domestik bruto Indonesia pada triwulan I tahun ini mencapai Rp 5.071,7 triliun. (BPS, 2023) Namun, rata-rata pendapatan penduduk hanya US\$ 4.783,9 atau setara dengan Rp 5,9 juta per bulan pada 2022. Bandingkan dengan Thailand di tahun yang sama mencapai US\$7,066.

Sementara indikator keamanan Indonesia bagi warga asing bisa diukur salah satunya dengan perlindungan dari ancaman terorisme. Menurut Institute Economic and Peace, Indonesia pada 2022 berada pada urutan 24 negara di dunia yang tidak aman dari ancaman terorisme.

Bukan pekerjaan mudah bagi pengambil keputusan. Meskipun begitu, melalui proses panjang untuk memperkuat posisi tawar paspor Indonesia tetap perlu dijalankan. □-d

**) Yohanes Ivan Adi Kristianto,
Dosen Fisipol Universitas Tidar, Alumni
S1 HI UGM & S2 HI University of Groningen*

Pojok KR

Pramuka DIY ikuti Jambore di Korsel.
-- **Semoga sukses unjukdiri di ajang ini.**

Komitmen pejabat kunci perangi gratifikasi.

-- **Mungkin masih banyak yang komitmennya diragukan.**

Antisipasi pembuangan sampah di sungai.

-- **Jangan sampai jadi masalah baru.**

Beraba

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito Mpd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)